

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR, INDONESIA

Fitrah Sari Islami

Email: fitrahsariislami21@gmail.com

Nugroho SBM

Department of Economics, Diponegoro University

Email: nugroho.sbm@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu masalah yang umum terjadi di Negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi yang nilai ketimpangannya cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui keadaan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan 1) Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan wilayah, 2) Analisis regresi linear berganda (*Ordinary Least Square*) dengan waktu penelitian tahun 2001-2015. Penelitian ini menggunakan software Eviews 9.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dengan nilai indeks Williamson lebih dari 1. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini ada tiga variabel yang hasilnya signifikan ($\alpha=5\%$) dan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu variabel investasi, angkatan kerja dan IPM serta dua variabel yang tidak signifikan yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci: Ketimpangan Wilayah, Indeks Williamson, Jawa Timur

Abstract

Regional inequalities are one of the most common issues in developing countries including in Indonesia. East Java is the province with the highest inequalities value compared to the other provinces in Java Island. This study aims to: 1) to calculate the inequality value in East Java Province, 2) to classify the regions in East Java Province using Klassen Typology, 3) to determine factors that affect inequalities value in East Java Province.

The methods used in this study were 1) Williamson Index to calculate the inequalities values, 2) Multiple linear regression analysis (Ordinary Least Square) during 2001 – 2015 using Eviews 9 software.

The result of the study showed that the level of regional inequalities in East Java Province tends to increase with the Williamson index value more than 1. The result of multiple linear regression analysis, the variable of investment, labor force and HDI were resulted to significant and it affect to the regional inequalities, meanwhile the variable of economic growth, and government expenditure were insignificant.

Keyword: inequalities, Williamson Index, Klassen Typology, East Java

PENDAHULUAN

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan lebih berarti apabila diikuti dengan pemerataan dari hasil-hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu melalui peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2004). Undang-undang tersebut yaitu UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi di Pulau Jawa dan Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat ketimpangan tertinggi selama 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka indeks pada tahun 2011 sebesar 0,979, tahun 2012 sebesar 0,981, tahun 2013 sebesar 0,982,

tahun 2014 sebesar 0,989 dan pada tahun 2015 sebesar 0,991. Keadaan tersebut terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur selain memiliki angka indeks ketimpangan paling tinggi dibandingkan provinsi lain dan juga angkanya selalu meningkat bahkan mendekati angka 1 dari tahun ke tahun. Provinsi DI Yogyakarta memiliki angka indeks ketimpangan yang terus menurun dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2011 sebesar 0,476 menjadi sebesar 0,470 pada tahun 2015.

Tabel 1. Indeks Williamsom Pulau Jawa Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	0,655	0,492	0,493	0,497	0,507
Jawa Barat	0,719	0,731	0,742	0,736	0,729
Jawa Tengah	0,697	0,704	0,670	0,666	0,635
DIY	0,476	0,474	0,472	0,472	0,470
Jawa Timur	0,979	0,981	0,982	0,989	0,991
Banten	0,703	0,710	0,709	0,626	0,625

Sumber : BPS (diolah)

Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menjadi awal masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah menjadi berbeda-beda. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur rata-rata presentasinya cukup tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Akan tetapi, dari kondisi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan perhitungan Indeks Williamson (Tabel 1) justru memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa bahkan angkanya mendekati angka 1.

Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Myrdal dalam Jhingan (1990) mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan besarnya dampak balik (*backwash effect*) yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Dampak balik berupa perpindahan modal atau investasi menyebabkan ketimpangan semakin besar

antara wilayah satu dengan lainnya. Disamping itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan wilayah diantaranya angkatan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia.

Menurut Tarigan (2005), PDRB perkapita adalah total PDRB suatu daerah atau negara yang dibagi dengan jumlah total penduduk di daerah atau negara tersebut. Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka semakin tinggi PDRB perkapita maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Selain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatnya, PDRB perkapita juga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan suatu wilayah.

Menurut Sjafrizal (2012), Faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa. Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan swasta (penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)) dan investasi yang dilakukan pemerintah. Investasi swasta mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Akan tetapi, menurut Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan

taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah (Tambunan, 2004). Berikut ini bisa kita lihat perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2015

Tabel 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015

Tahun	Nilai IPM
2011	66.06
2012	66.74
2013	67.55
2014	68.14
2015	68.95

Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 dijelaskan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur selama 5 tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai IPM sebesar 66,06 dan terus meningkat sampai pada tahun 2015 sebesar 68,95. Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti

kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mopangga (2011) ditemukan bahwa kondisi ketimpangan di Provinsi Gorontalo diawal pembangunan cenderung meningkat (*divergence*) dan berangsur menurun (*convergence*) seperti yang ditunjukkan oleh kurva ketimpangan pembangunan dalam Hipotesa Neo-Klasik. Secara simultan, perbedaan pada PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Belanja Infrastruktur (RBI) sangat signifikan sebagai sumber utama ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Pada model dengan menggunakan Indeks Williamson, PDRB per kapita signifikan serta IPM dan RBI sangat signifikan sebagai sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011) yang menggunakan analisis indeks wiliamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda, dari analisis tersebut menghasilkan nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai indeks wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinsi ini. Dari empat variabel tersebut, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2015, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta pengaruh PDRB Per Kapita, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2015.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketimpangan di Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur, serta melihat pengaruh PDRB Per Kapita, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2015.

LANDASAN TEORI

Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam melakukan analisa perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam suatu pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah lain.

Solow (1996), berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil (output). Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Teori pertumbuhan neoklasik berawal dari suatu asumsi sederhana, yaitu: perekonomian akan mencapai kondisi pertumbuhan yang konstan (*steady state*) Asumsi yang digunakan untuk menjelaskan Model Solow-Swan antara lain :

1. Produksi menggunakan 3 input utama yaitu; modal (K), tenaga kerja (L) dan teknologi (T), sehingga fungsi produksi diformulasikan :

$$Y(t) = F[K(t), L(t), T(t)] \dots\dots\dots (2.1)$$

2. Perekonomian tertutup, dengan formulasi :

$$Y(t) = C(t) + I(t) \dots\dots\dots (2.2)$$

dan keseimbangan perekonomian tertutup adalah:

$$S(t) = I(t) \dots\dots\dots (2.3)$$

3. Tabungan adalah sebagian dari output yang tidak dikonsumsi, sehingga :

$$S(t) = sY(t) \dots\dots\dots (2.4)$$

4. Modal bersifat homogen dan terdepresiasi dengan tingkat konstan (δ), sehingga penambahan akan positif jika investasi baru lebih besar dari depresiasi capital.

$$K(t) = I(t) - \delta K(t) = s.F[K(t), L(t), T(t) - \delta K(t)] \dots \dots \dots (2.5)$$

5. Populasi (L) dan teknologi (A) tumbuh konstan dan bersifat eksogen, dengan tingkat pertumbuhan :

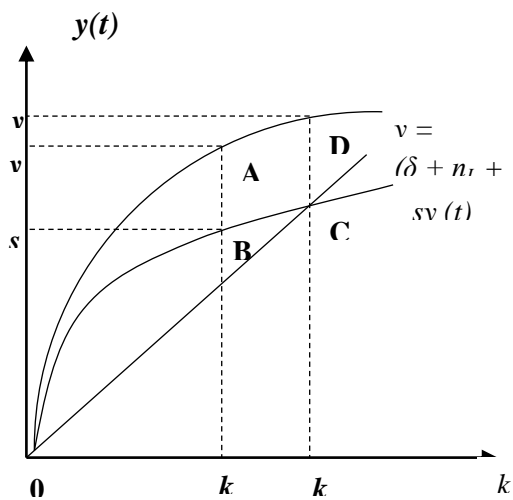
$$n_L \geq 0 \dots \dots \dots (2.6)$$

$$n_A \geq 0 \dots \dots \dots (2.7)$$

Fungsi produksi pada persamaan (2.1) memiliki beberapa properti, yaitu; (1) *constant return to scale*, (2) *positive and diminishing return to private inputs*, (3) *inada condition* dan (4) *essentiality*. Persamaan fundamental dari Model Solow-Swan, sebagai berikut :

$$k(t) = sy(t) - (\delta + n_L + n_A)k(t) \dots \dots \dots (2.8)$$

Berdasarkan asumsi dan properti tersebut, Model Solow-Swan digambarkan dalam Gambar 1.



Sumber : Dornbusch , 2008

Gambar 1. Output dan Investasi pada Steady State

Pada suatu waktu, perekonomian akan mencapai kondisi *steady state*. Kondisi *steady state* merupakan kondisi ketika pendapatan perkapita dan elemen produksi perkapita lainnya tumbuh konstan. Kondisi *steady state* diformulasikan pada persamaan :

$$sy(t) = (\delta + n_L + n_A) k(t) \dots \dots \dots (2.9)$$

Oleh karena itu, dalam Model Solow-Swan, y, k , dan c tumbuh konstan pada kondisi *steady state*. Agar y, k , dan c konstan, maka Y, K , dan C harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan $(n_L + n_A)$. Dengan demikian, pertumbuhan jangka panjang bergantung pada faktor eksogen.

Berdasarkan Model Solow-Swan, setiap input berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana diformulasikan :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \varepsilon_K \frac{\Delta K}{K} + \varepsilon_L \frac{\Delta L}{L} + \varepsilon_A \frac{\Delta A}{A} \dots (2.10)$$

Dengan ε_K adalah kontribusi modal, ε_L adalah kontribusi tenaga kerja dan ε_A adalah kontribusi teknologi. Persamaan (2.9) disebut sebagai *growth accounting*, dengan $[\varepsilon_A \frac{\Delta A}{A}]$ merupakan input produksi selain modal dan tenaga kerja yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Model Solow-Swan menyimpulkan bahwa mesin pertumbuhan adalah perkembangan teknologi. Akan tetapi, model tersebut mengasumsikan bahwa teknologi bersifat eksogen. Dengan demikian, Model Solow-Swan meninggalkan celah yang belum dapat dijelaskan. Romer dan Lucas (1980) mengembangkan Model Solow-Swan dengan menjadikan teknologi sebagai faktor endogen. Model Romer menunjukkan bahwa total produksi ditentukan oleh perilaku-perilaku agen ekonomi. Dalam salah satu model pertumbuhan endogen, model ΔK , modal harus didefinisikan dalam arti yang lebih luas, yaitu : modal fisik dan modal manusia agar terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Teori Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat

pada masing-masing wilayah (Sjafrizal, 2008).

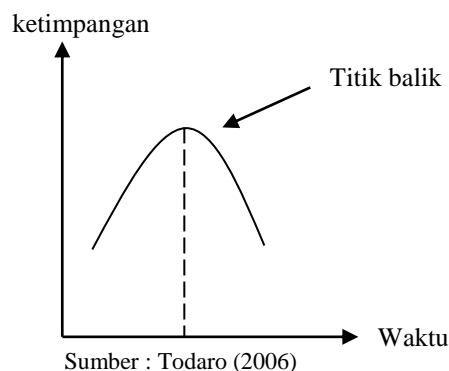
Mubyarto (1995) membedakan ketimpangan menjadi 3, yaitu:

1. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan pertanian.
2. Ketimpangan antar daerah, Ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki.
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah yang paling berat. Ketimpangan ini sangat mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis.

Menurut Hipotesis Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Sehingga bila mencermati hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa awal pembangunan suatu negara pada umumnya ketimpangan antar daerah akan meningkat akan tetapi setelah mengalami proses yang terus menerus bahwa ketimpangan tersebut akan menurun. Sesuai dengan "Hipotesis Kuznets" yang menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik (*Reverse U-shape Curve*). Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi dan pada akhir proses pembangunan ketimpangan menurun.

Kebenaran Hipotesis Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *timeseries* dan *cross-section*. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo-Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.



Gambar 2. Kurva Kuznets

Menurut Sjafrizal (2012) Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, yaitu, perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Adapun yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut adalah, banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan, belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, kesenjangan pembangunan antara kota dan desa (Bappenas, 2016)

Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak ini merupakan dampak turunan dari kurangnya lapangan kerja di suatu daerah bersangkutan, yang disebabkan kurangnya investasi baik dari

pemerintah maupun swasta, dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Jika pengangguran terjadi maka biasanya disusul terjadinya kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (generasi berikutnya) cenderung rendah, karena terbatasnya kemampuan untuk menikmati pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat bahkan cenderung tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan yang paling krusial yaitu makanan dan minuman.

Tingkat ketimpangan wilayah dapat dihitung menggunakan beberapa metode yaitu indeks Williamson, Tipologi Klassen, Indeks Entrophy Theil dan ketimpangan berdasarkan konsep PDRB per kapita relatif.

Indeks Williamson

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 2012)

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / N}}{Y} \dots\dots\dots(2.11)$$

Dimana:

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson berkisar antara $0 < VW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Sjafrizal, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Anto Dajan (2000) yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Penelitian juga didukung dengan data dari

pustaka-pustaka dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis di Provinsi Jawa Timur dengan data runtut waktu (*time series*) selama tahun 2005-2015. Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain:

- Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Indonesia dalam beberapa terbitan.
- Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
- Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari institusi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan maka model yang digunakan pada data *time series* ini adalah model regresi berganda menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

Model umum regresi linear berganda yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_t \dots (3.1)$$

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur yaitu:

$$KW = \beta_0 + \beta_1 G + \beta_2 I + \beta_3 IPM + \mu_t \dots (3.2)$$

KW = Ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, G = Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, I = Investasi di Provinsi Jawa Timur, IPM = Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur, β_0 = Intersep, $\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi variabel independen, μ = *error term*, t = *time series*.

Analisis Ketimpangan Wilayah

Williamson dalam Sjafrizal (2012) meneliti hubungan antara ketimpangan wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi. Penelitiannya menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan negara berkembang. Ternyata ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi semakin lebar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Untuk menganalisis ketimpangan wilayah yaitu dengan

menggunakan nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / N}}{Y} \dots\dots\dots(2.11)$$

Dimana:

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar.

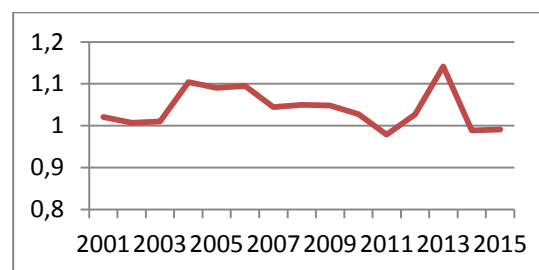
HASIL

Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Timur

Ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dihitung dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Williamson. Data yang diperlukan antara lain data PDRB provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota. Dimana menurut Sjafrizal (2012) apabila nilai indeks williamson mendekati angka 1 maka ketimpangan yang terjadi cenderung tinggi dan semakin menjauh dari angka 1 ketimpangan yang terjadi cenderung rendah.

Gambar 4.1 menunjukkan tren ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001-2015 diamati melalui perhitungan Indeks Williamson terlihat bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Timur mengalami fluktuasi dan cenderung tinggi karena besarnya nilai yang sangat tinggi yaitu mendekati angka 1 dan bahkan ada yang nilainya justru melebihi angka 1. 1 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Herni Rochana tentang kesenjangan ekonomi antar wilayah pada era otonomi daerah di Indonesia (2013) bahwa pada tahun 2003-2011 nilai indeks williamson

PDRB per kapita kabupaten/kota di Indonesia nilainya lebih dari 1.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 3. Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2015

Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan atas asumsi klasik. Pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien

Deteksi Multikolonieritas

Deteksi multikolonieritas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah model. Multikolonieritas adalah adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

Tabel 3. Perhitungan VIF

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.015368	3638.197	NA
G	5.96E-06	51.90688	1.370027
I	7.90E-14	88.96825	4.375734
AK	2.79E-17	2631.404	2.058724
IPM	2.74E-06	3019.405	1.763408
GE	5.90E-19	5.344052	2.636179

Sumber : Data eviws, diolah 2017

Berdasarkan tabel 3 diatas, terlihat bahwa nilai VIF besarnya tidak lebih dari 10 (berkisar antara 1.370027 sampai 4.375734) yang artinya bahwa model dalam penelitian ini terbebas dari multikolonieritas.

Deteksi Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengguna-

kan *White's robust standard errors* bahwa nilai prob. Chi square dari $Obs \cdot R\text{-Square}$ lebih dari nilai $\alpha = 0.05$ yaitu sebesar 0.1065 yang artinya model dalam penelitian ini terbebas dari penyakit heteroskedastisitas.

Deteksi Autokorelasi

Berdasarkan hasil diperoleh nilai *Durbin Watson* (d) sebesar 0.0001. Dari uji *Durbin Watson* diketahui nilai d_L dan d_U dengan jumlah variabel bebas 5 adalah 1-G (0.5326), 2-I (0.8949), 3-AK (0.6971), 4-IPM (0.4542) dan 5-PAD (0.2919). nilai d sebesar 0.3530 maka pengambilan keputusannya adalah data tersebut menolak H_0 dan ada autokolerasi. Untuk mengatasi autokolerasi maka model tersebut menggunakan GLS dengan diberi perlakuan *cross-section SUR (Seemingly Unrelated Regression)* dan *cross-section SUR (PCSE) standard errors and covariance*. Sehingga asumsi autokolerasi dapat diabaikan.

Tabel 4. Hasil Estimasi Variabel Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah

Variabel	Koefisien
Konstanta	1.063.848 7,446617
G	-0,002815 -0,968578
I	-2,36127 **-12,81056
IPM	0,002007 1,062428
<i>R-squared</i>	0,845717
<i>F-statistic</i>	73,08818
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000
<i>Durbin-Watson stat</i>	0,515270

Sumber: Output Eviews 9, 2017

****Keterangan signifikan t. tabel < t. statistik pada level >0,05**

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dari

hasil regresi yang ditunjukkan oleh Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R^2 adalah sebesar 84,57% variabel pertumbuhan ekonomi (G), investasi (I) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan 16,43% sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan persamaan didapatkan nilai F-hitung sebesar 73,088 lebih besar dari F-tabel yaitu 2,84 dan nilai probabilitas F-hitung 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Timur.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia menunjukkan arah hubungan negatif dan secara statistik tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah, pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur pada periode 2005-2015. Variabel investasi memiliki arah hubungan yang negatif dan secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah, pada tingkat signifikansi alpha 5%. Artinya bahwa setiap peningkatan investasi akan menurunkan tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan nilai koefisien 2,36127 dan nilai t tabel < t statistik ($1,684 < 12,810$), bahwa dapat diinterpretasikan setiap peningkatan investasi sebesar 1% akan menurunkan tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur sebesar 2,36127%. Pengaruh faktor investasi memberikan efek yang besar terhadap penurunan tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil estimasi regresi variabel pada Tabel 4.

Intrepetasi Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4 diketahui bahwa variabel investasi (I), secara signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi (G), dan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Ada semacam *trade off* antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Chan (1993) yang menunjukkan bahwa begitu kondisi ekonomi di China mengalami peningkatan, maka ketimpangan pendapatan justru meningkat. Dalam artikel yang ditulis Subarna K. Samanta, Allison Heyse (2006) disebutkan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Orientasi mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dalam distribusi pembangunan yang lebih merata sehingga menciptakan ketimpangan.

Menurut Adhisasmita (2005) bahwa investasi merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Di daerah perkotaan yang sedang

mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi, dan demikian seterusnya. Di daerah-daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Dari hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Danawati dkk (2016) bahwa investasi memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2014) yang meneliti ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa variabel investasi memiliki berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan antar daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) menjelaskan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan antar daerah. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mopangga (2011) yang menyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai sumber ketimpangan sama seperti yang telah dijelaskan oleh Dumairy (2010) bahwa IPM memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah karena kualitas pembangunan manusia besar pengaruhnya terhadap pemabnguan daerah. Teori ekonomi tentang teori modal manusia dipelopori oleh para pemenang nobel ilmu ekonomi, yaitu Gary Becker, Edwar Dension dan Theodore Schultz. Teori ini menjelaskan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih besar dibanding yang pendidikannya rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, semakin banyak orang yang memiliki pendidikan

tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi (Jhingan, 2010).

PENUTUP

Kesimpulan

Tingkat ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2015 mengalami fluktuasi dan cenderung tinggi karena besarnya nilai yang sangat tinggi yaitu mendekati angka 1 bahkan untuk tahun 2001-2010 nilai indeks Williamson lebih dari 1. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk dapat mengatasi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil analisis regresi terkait dengan pengaruh G, I, IPM dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel I memiliki hubungan negatif dan signifikan dan variabel IPM memiliki hubungan positif dan tidak signifikan.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan pemerintah yang sebaiknya dilakukan adalah salah satunya dengan meningkatkan kualitas IPM dan pertumbuhan ekonomi agar ketimpangan semakin menurun.

Keterbatasan Penelitian

Pertama, penelitian hanya menggunakan 3 variabel, padahal masih ada variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Kedua, tahun yang digunakan hanya 10 tahun sehingga harus menggunakan data interpolasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dajan, A. (2000). *Pengantar Metode Statistik*, Jilid I, II, LP3ES. Jakarta

Dornbusch, R. (2008). *Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Media Global Edukasi.

Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga

Mopangga, H. (2011). *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.

Mubyarto. (1995). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI. Jakarta

Nurhuda, R. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 110-119.

Rochana, S. H. (2013). *Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia*. Bandung: Perencanaan Wilayah dan Kota.

Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tambunan, T. (2004). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Todaro, M. P. dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.